

SKRIPSI
ANALISIS PRAKTIK NEPOTISME DALAM PEMILIHAN UMUM PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015

Diajukan sebagai syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum



Disusun Oleh :
LARA AULIA LESMANA
2110012111219

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 10/HTN/FH/III-2025

Nama : Lara Aulia Lesmana
NPM : 2110012111219
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Enam Bulan Febuari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Saaidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

Helmi Chandra SY, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 10/HTN/FH/III-2025

Nama : Lara Aulia Lesmana
NPM : 2110012111219
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Lima Bulan
Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 terjadi dalam beberapa kasus diantara nya yaitu :
 - a. Kasus Gibran Raka Buming Raka
 - b. Kasus Atut Chosiyah
 - c. Kasus Rizky Nata Kusumah
 - d. Kasus Epriyadi Asda
 - e. Kasus Ismunandar dan Encik Unguria
2. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Nepotisme Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yaitu :
 - a. Pembatasan sudah diatur dalam Undang-Undang
 - b. Mengandung muatan diskriminasi
 - c. Sulit diterapkan karena pemaknaanya diserahkan pada setiap orang
 - d. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

B. Saran

1. Agar Pembentuk Undang-Undang kembali melarang praktik nepotisme dalam pemilihan umum di Indonesia.
2. Agar pemerintah perlu meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka lebih memahami tentang potensi bahaya nepotisme dalam sistem politik. Dengan meningkatkan kesadaran ini, masyarakat bisa lebih kritis dalam

memilih calon yang benar-benar memiliki kapasitas dan integritas, bukan hanya karena hubungan keluarga dan pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menegakkan sanksi yang lebih tegas terhadap praktik nepotisme, politik uang, dan penyalahgunaan wewenang dalam Pilkada. Hal ini bisa berupa pencabutan hak politik atau disqualifikasi bagi calon yang terbukti terlibat dalam praktik nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Apreni, R. 2022. *Jenis-Jenis Mahkamah Konstitusi*. Pascal Books, Banten
- Ahmad Tazeh. 2023. *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras. Yogyakarta
- Budiardjo, P. M. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. In P. Gramedia. Jakarta.
- Ibrahim. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media. Jakarta.
- Mayestati, S. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. In Lppm. Univ Bung. Hatta. Padang.
- Meri Naherta, A. S. 2023. *Asas-Asas Pemilihan Langsung*. Penerbit Meri, Indramayu
- Pradana, H. A. 2020. *Pokok-Pokok Asas Pemilihan Langsung*. Jakarta.
- Soekanto, S. 2020. *Dasar Hukum Pemerintahan Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta
- Sheyla Nichlatus Sovia, A. R. 2023. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Kediri

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015.

C. Sumber Lain

- Agus Riwanto. 2020. *Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif* Nepotisme. Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol 2, No.2
- Ahmac Mochtar. 2020. *Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme disebabkan korupsi* <https://kompas.comnewsnasional> diakses pada tanggal 15 Maret 2025

- Andi Safriani. 2020. *Hubungan Antara Hukum Dan Kekuasaan* . Jurnal Lawfirmhukum, Vol 3. No, 2
- A Bathoro. 2021. *Dinasti Politik Konsolidasi Demokrasi*. Jurnal Fisip Umrah, Vol 2, No 2.
- Ashita Dewi Mustika Syanur. 2021 . *Politik Dinasti Di Indonesia Tinjauan Kritis Terhadap.Penerapan Demokrasi Di Era Atut Chosiyah*. <https://indexdetik.com>
- Azzahra F. 2021. *Munculnya Praktik Nepotisme*. <https://Harian Kompas.com.id>
- Alvina Alya Rahma, A. A. 2022. *Pengaruh Nepotisme Terhadap Perkembangan Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan , Vol.6 No.1.
- Ahmad A. 2023. *Kasus Epriyadi Asda Dan Efeknya Pada Demokrasi Indonesia*. [https://](https://Detiknews.comview/1626). Detiknews.comview/1626.
- Bisariyadi, A. T. 2023. *Komporsi Mekanisme Pemilu*. Penelitian dan Pengkajian Perkara,Mahkamah Konstitusi, Vol.2,No.3.
- .Budianto. S. 2023. *Penerapan Masyarakat Terhadap Praktik Nepotisme Di sektor Publik*. Jurnal Etika Politik, Vol 5.
- Dwindra, S. 2023. *Kekuasaan Pemilu Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi*. Journal Politica, Vol.2,No.11
- Hukum <https://law.ui.ac.id/kuliah-umum-bivitri-susanti-kemunduran-demokrasihukumpasca-pputusan-mk-90-puu-xxi-2023/>
- <https://jkt.mk.gp.id/putusanmahkamahkonstitusinomor33/puu-xiii/2015>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home2025Details/68219/uu-no-7-tahun-2017>.
- Hasan, R. 2021. *Pengujian Undang-Undang Pasal 7 Huruf r Sebuah Telaah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015* . Jurnal Ilmu Hukum, No 3.
- Komisi Pemilihan Umum, K. P. 2019, Februari. *Pemilu 2019 Kpu*. Retrieved Oktober 9, 2024, <https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019>.
- Kompas Tv.com.2024. *Kasus Nepotisme*, diakses tanggal 21 Oktober 2024, <https://youtube./tzlq5237frng>.
- Kharudin. 2024. *Kasus Nepotisme Epyardi*. diakses tanggal 12 Desember 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=w3gbgqGgnKU>
- Kukuh Galang Waluyo, *Pengaturan Pasal 7 Huruf r Nepotisme* <https://djpb.mahkamahkonstitusi.go.id/2024>.
- Mattalatta, R. 2019. *Jenis Nepotisme Politik Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5.

- Lestari, R. 2020. *Kontroversi Nepotisme dalam Penunjukan Pejabat Negara: Studi Kasus pada Pemerintahan Indonesia*. Jurnal Politik dan Hukum, Vol 1, No 3.
- Muthia S, dkk, 2023, *Pengertian Pemilu Di Indonesia*. Jurnal Politik Hukum, Vol 2
- Martien Herna Susanti. 2024. *Pengertian Nepotisme*. Jurnal Of Government and civil society, Vol 1, No 2
- Nepotisme, P. 2020,. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara. Retrieved Oktober 19, 2024, *Pengertian Nepotisme*". Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Online, diakses <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>.
- Nilatul Mufidah, Syahrul Ibad , Dairani. 2021. *"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Terhadap Praktik Dinasti Politik"* Jurnal Multidisiplin Ilmu, vol 3, No 1.
- Nabthoro. A. 2021. *Nepotisme Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi* . Jurnal Fisip Umrah.
- Nawir Aarsyad Akbar, dkk. 2021. *Menghitung Politik Nepotisme*
<https://republika.co.id/berita/qlqkn436/menghitung-nasibpolitik-nepotisme-pilkada->
- O, Rosifany. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Nepotisme Di Indonesia*. Jurnal Legalitas Indonesia, Vol.5, No.2.
- Pratama, I. 2017. *Mahkamah Konstitusi Putuskan Pengujian Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Pemilu*. Kompas. www.kompas.com.
- Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi. 2022. diakses tanggal 20 Oktober 2024, https://pusdik.mkri.id/materi_landasan_hukum_dan_Konstitusi_dalam_memberikan_putusan.
- Politik Nepotisme dan Faktor. Suara Merdeka.com
<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/70311/politik-dinastidan-korupsi-daerah?page=2024>
- Ridwan H . 2023. *Kasus Nepotisme*. dikutip Kumparan.com, <http://youtube/tz1q5cs7fmu>.
- Raja Dachroni. 2024. Efek Buruk Politik Nepotisme. <https://kepridays.co.id/2020/03/11/efek-buruk-politik-dinasti/>
- Rudi. P. 2024. *Nepotisme Dan Pengaruhnya Terhadap Integritas Pejabat Publik*. <https://Tribunsnewhclwerw345.com.id>
- Rachmad Edi Subriyanto. 2024 . *Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi Vol 2.

- Rahmat Nur. Dkk. 2024. *Analisis Hukum Putusan Mk Nomor 33/PUU-XIII/2015 Mengenai Calon Bupati Atau Walikota Dari Anggota Legislatif*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar.
- Renata Dwi Kartika. 2024. *Analisis Hukum Putusan Mk Nomor 33/PUU-XIII/2015*. *Jurnal Info Singkat Hukum*, Vol 1, No, 14
- Redaksi Pemerintahan. 2024. *Kekuatan Hukum Dalam Konstitusi*. <https://antikorupsi.org>
- Sutrisno D. 2017 . “Pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang “. *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol 2
- Salim, H., Azhari, R. 2018. *Praktik Nepotisme dalam Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015*. *Jurnal Politik Indonesia*, Vol 2.
- Septya Hanung Surya Dewi ,2022,” *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Dikaitkan Dengan Pembatasan Politik*” *Jurnal Hukum Legal*, Vol 2
- Silverius Tey Seran, V. R. 2024. *Pengertian Nepotisme* . *Jurnal Terapan Pemerintahan*, Vol.2,No.11.
- Tey Seran, V. R. 2024. *Nepotisme Dalam Prepektif Administrasi Politik menjelang pemilihan umum*. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, Vol 4.
- Umi Muslikhah, Halimah Nur Izzati, Ahmad Fuadi. 2022 , “Keberadaan Politik Kekerabatan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Uir Lawreview*, Vol 6, No 1.
- Wibowo E, Surya, A. 2019. *Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Dalam Pemerintahan Lokal di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 12, No 2
- Wulandari, A. "Mengungkap Praktek Nepotisme dalam Penunjukan Pejabat di Indonesia” <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/nprt/5/uu-no-30-tahun2014-administrasi-pemerintahan>.
- Yuliana R . 2023. *Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada..* *Jurnal Singkat Hukum*. Vol. 7, No. 14.